

KATA OMBUDSMAN, JAKSA TP4D BAGIAN DARI MASALAH

Selasa, 19 November 2019 - Victor William Benu

Kupang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan, ada oknum jaksa Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), merupakan bagian dari masalah karena diketahui ikut menjadisupplier material proyek.

"Jaksa TP4D untuk beberapa proyek di daerah dianggap sebagai bagian dari masalah, karena jaksa ikut menjadisupplier material," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton di Kupang, Selasa (19/11).

Dia mengemukakan hal itu, terkait rencana Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan TP4D.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).

Hal ini dikatakan Burhanuddin usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11).

"Seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR bahwa, kami akan mengevaluasi TP4," kata Burhanuddin.

Mengenai keberadaan TP4D dia mengatakan, sangat tergantung pada hasil evaluasi yang akan dilakukan Kejaksaan Agung.

"Tetapi pengalaman TP4D di beberapa provinsi malah jadi masalah. Di Semarang Jaksa TP4D malah ditangkap KPK," kata Darius Beda Daton. Karena itu, yang paling tepat melakukan fungsi pengawasan proyek itu bisa di BPKP atau Inspektorat.